

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahsanul Minan (ed), *dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019* Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hal. 237.
- IDEA, *Electoral Justice: An Overview Of the International IDEA Handbook*, Terj. Dua Bahas, Indonesia Pintar, Jakarta, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar grafika, Jakarta, 2006.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Ramlan Surbakti Dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011.
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan kedepan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Saldi Isra. dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sri Mamudji. dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Veri Junaidi, *“Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”*, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU. DPRD/XVII/2019
Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 146-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

C. Internet

M.A Salim P.Siregar (ed), Dimuat didalam Restatement Kumpulan Kajian Hukum Pemilu, Bawaslu.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 *Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu>, diakses tanggal 04 November 2019 pukul 20.45 WIB

Heru Widodo, *(Dibacakan Pada Seminar Nasional 2019,thema “Quo Vadis*

Pemilu yang Jujur dan Adil” yang diselenggarakan Universitas Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah di Hotel Sunlake Sunter Jakarta, pada tanggal 7 September 2019). Diakses melalui <https://www.mediagaruda.co.id/2019/09/07/refleksi-atas-penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran-sengketa-proses-dan-perselisihan-hasil-pemilu/>. Pada 02 Oktober 2019 pukul 05.35 WIB

Pendapat mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/06/27/mk-pelanggaran-administrasi-bersifat-terstruktur-sistematis-dan-masif-ditangani-bawaslu>, diakses tanggal 03 Oktober 2019 pukul 14.23 WIB.

<https://kbbi.web.id/langgar>, Diakses 14 November 2019 Pukul 20.05.

